

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM 1.000 TAPAK
RUMAH GRATIS DI DESA PALAS KECAMATAN PANGKALAN KURAS
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2016**

Anton Firdaus

Email : Firdaus.anton1996@gmail.com

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

In February 2016 the Government of Palas Village initiated a program initiative of 1,000 free home footprints that had been agreed with the Village Consultative Board using the funds from the Palas Village Head's donation, the program was given to the poor and unemployed communities, the program of 1,000 free home footprints This is not only for the Palas Village community, but the Palas Village Government also opens opportunities for people from outside the village outside the sub-district. Tread house here is empty land with size 15 m x 20 m = 300 m² or covering 30 hectares.

The purpose of this study is to find out how the strategy of the Palas Village Government in the implementation of the 1.000 second free home footprint program, to find out how the impact of the 1,000 free home footprint program provided by the Palas Village Government for the progress of Desa Palas. In this study, the authors use descriptive research type with qualitative analysis method .. The location of this study was conducted in Palas Village District Pangkalan Kuras Pelalawan District. This research uses the theory of strategy and authority theory. Data collection techniques in this study is by way of interviews and see the documentation to complete the data in this study. Qualitative research method is an option in this study because the author wants mengeksplore more in-depth study by looking at the phenomenon and reality that exist in this study.

Based on the results of the analysis of this study shows that: the implementation strategy of the program of 1000 free home footprint is done in phases, given the source of funds that only comes from the contribution of the Head of Palas village amounting to approximately Rp.600.000.000, -. Then the building program of 1,000 free home footprint is very good impact on the economic growth of the community of Palas Village and also the progress of Desa Palas.

Keywords: *Strategy, Village Government*

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamlirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, sejak saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tujuan luhur yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur, maka sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara, pemerintah Indonesia sangat giat untuk menjalankan program pembangunan nasional.

Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan pembangunan yang paling menyentuh kehidupan masyarakat tingkat pedesaan. Menurut B.N Marbun (1998 :24) menyatakan bahwa pembangunan Indonesia tidak ada artinya tanpa pembangunan desa, ketahanan nasional berdasarkan pada desa, hari depan Indonesia terlekat dan bergantung pada berhasil tidaknya dalam membangun desa.

Salah satu tugas aparatur pemerintah dalam pembangunan nasional yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pengabdian bagi aparatur pemerintah haruslah mencakup semua tingkatan mulai dari pusat sebagai struktur pemerintahan tertinggi sampai pemerintahan desa sebagai struktur pemerintahan terbawah dalam suatu negara. Memaknai hal tersebut maka desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa haruslah memiliki aparatur yang cakap akan tugas dan kewajiban sebagai garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Landasan pemikiran mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja,2003:3).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan

pembangunan nasional khususnya di daerah-daerah pedesaan melalui berbagai kebijakan. Dimulai pada tahun 1994, pemerintah menjalankan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang kemudian dilanjutkan dengan program-program lainnya (Surbakti. Rahman,2006:57). Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan salah satu titik berat dalam pembangunan di Indonesia maka, harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah pusat karena mengingat masih banyaknya masalah di pedesaan yang perlu mendapatkan perhatian serius, hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia bertempat tinggal di kawasan pedesaan.

Keberadaan Desa sebagai yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam hal ini pemerintah desa memiliki peranan yang sangat penting dalam

mewujudkan pembangunan desa. Tugas utama pemerintah desa adalah menjalankan roda pemerintahan desa dengan kebijakan yang telah ditetapkan secara bersama serta mensejahterakan kehidupan masyarakat desa dengan adanya program pembangunan desa sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Dalam melaksanakan peningkatan pembangunan diperlukan sumber daya manusia yang mampu merencanakan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan lebih lanjut secara partisipatif. Sumber daya manusia sebagai pelaku untuk melaksanakan koordinasi kegiatan pembangunan. Di dalam ruang lingkup desa yang termasuk sumber daya manusia yang memiliki peran sangat penting untuk melaksanakan pembangunan desa yaitu aparatur pemerintah desa. Aparatur pemerintah desa bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program dalam meningkatkan pembangunan pada desa yang bertujuan untuk pembangunan desa.

Aparatur pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa yang termasuk di dalamnya yaitu Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi. Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa untuk menjalankan roda pemerintahan desa, Kepala Desa secara mekanisme dipilih langsung oleh masyarakat desa itu sendiri melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Dalam konteks ini Pemerintah Desa di bawah kepemimpinan Kepala Desa sangatlah besar perannya dalam menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan di desa, karena Pemerintah Desa merupakan administrator pembangunan, administrator pemerintahan, dan administrator kemasyarakatan desa. Jadi

jelas bahwa tanpa adanya peran dari Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan tidak akan berhasil sebagaimana yang diharapkan. Dalam menjalankan aktivitas Pemerintahan Desa, kepemimpinan Kepala Desa sangat erat hubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa pada era desentralisasi. Pada era ini masyarakat diberikan hak untuk mengatur sendiri daerahnya sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat setempat. Demikian halnya bagi masyarakat Desa, partisipasi masyarakat Desa merupakan salah satu butir penting dalam Pemerintahan Desa. Hasil dari kerjasama antara perangkat Desa dengan seluruh masyarakat Desa bertujuan untuk mendapatkan hasil yang optimal terhadap pencapaian untuk pembangunan Desa.

Pembangunan yang dimaksud disini adalah pembangunan yang bersifat fisik dari kegunaannya bagi kepentingan masyarakat desa seperti: pembangunan mesjid, musholla, sekolah, pasar, jembatan, jalan dan sebagainya. Dengan demikian, konsep pembangunan yang dipakai adalah bersifat merubah atau memperbaiki kondisi fisik dari suatu wilayah yang diperlukan bagi kepentingan masyarakat Desa yang bersangkutan di dalam penyelenggaraan kehidupan sehari-hari.

Berkenaan dengan uraian di atas, di Kabupaten Pelalawan terdapat 12 Kecamatan yang salah satunya yaitu Kecamatan Pangkalan Kuras. Jika di Kecamatan ini terdapat 17 Desa dengan luas wilayah sekitar 118.388 hektar dan memiliki 55.607 jiwa penduduk.

penulis tertarik melakukan penelitian di Desa Palas, karena Desa Palas merupakan salah satu Desa dari Kecamatan Pangkalan Kuras yang memiliki jumlah Kartu Keluarga (KK) nomor empat terkecil di Kecamatan tersebut. Desa Palas memiliki luas wilayah

seluas 9.500 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 2.040 jiwa dan 377 Kartu Keluarga (KK). Melihat dari jumlah penduduk tersebut pada bulan Februari 2016 Kepala Desa Palas yang bernama H. Samsari. AS berinisiatif untuk melakukan pembangunan infrastruktur Desa berupa pembangunan 1.000 tapak rumah gratis yang digagas oleh Kepala Desa Palas itu sendiri dan telah disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa Palas dengan tujuan mensejahterahkan kehidupan masyarakat, Meningkatkan pembangunan Desa melalui pengembangan tata ruang Desa, Sebagai wujud dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis ini menggunakan sumber dana dari sumbangan Kepala Desa Palas, yang diberikan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang belum memiliki rumah sendiri, program ini tidak hanya untuk masyarakat Desa Palas saja tetapi Pemerintah Desa Palas juga membuka kesempatan untuk masyarakat dari luar Desa, luar Kecamatan hingga luar Kabupaten.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sumber dana yang berasal dari sumbangan Kepala Desa Palas.
2. Adanya pembagian tapak rumah yang tidak tepat sasaran.
3. Masih rendahnya tingkat pendidikan Pemerintah Desa.

Dari identifikasi masalah di atas maka penulis menjabarkan masalah yang terjadi di Desa Palas tersebut yang pertama yaitu dana, untuk pembukaan program 1.000 tapak rumah gratis berjumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Kemudian masalah selanjutnya yaitu adanya masyarakat yang mendapatkan tapak rumah tersebut tetapi masyarakat itu tidak

termasuk dalam kategori miskin dan mereka mengambil tapak rumah tersebut untuk membangun rumah setelah itu rumah tersebut akan dia kontrakan. Sesuai dengan Peraturan Desa Palas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program 1.000 Tapak Rumah Gratis bagi warga tidak mampu pada Pasal 6 berbunyi tapak rumah yang diberikan Pemerintah Desa harus segera di tempati dan tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan dengan cara apapun. Dan pada Bab V Pasal 7 mengatakan bagi warga yang melanggar pasal 6 di atas, maka Pemerintah Desa akan mengambil kembali tapak rumah tersebut untuk diberikan kepada warga yang lebih membutuhkan.

Kemudian tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kinerja dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, Pemerintah Desa Palas harus dituntut lebih selektif dalam pendataan warga yang layak mendapatkan tapak rumah gratis tersebut, karena jumlahnya yang begitu banyak, tidak hanya dari dalam Kecamatan bahkan sampai luar Kecamatan membuat Pemerintah Desa sedikit kesusahan dalam mendata dan menyekleksi warga yang benar-benar layak mendapatkan tapak rumah gratis tersebut.

Menariknya penelitian ini dibuat, dilihat dari adanya program yang dilaksanakan Pemerintah Desa hanya dengan dana sumbangan dari Kepala Desa Palas, Pemerintah Desa mampu melaksanakan program yang inovatif, Pemerintah Desa mampu memperbesar wajah Desa dengan menarik warga dari luar Desa bahkan luar Kecamatan dan luar Kabupaten untuk bertempat tinggal di Desa Palas tersebut.

Dari jumlah kartu keluarga yang terdata mendapatkan tapak rumah gratis, Pemerintah Desa Palas mampu membuka pemukiman baru yang sebelumnya hanya memiliki 9 RT 4 RW sekarang menjadi 11 RT 5 RW. Dan dengan adanya program 1.000

tapak rumah gratis ini Pemerintah Desa mampu mengurangi jumlah kemiskinan dan mampu mensejahterakan kehidupan masyarakatnya dengan adanya program tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang “Strategi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program 1.000 Tapak Rumah Gratis di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2016?”

Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Pemerintah Desa Palas dalam pelaksanaan program 1.000 tapak rumah gratis ?
2. Bagaimana dampak dari program 1.000 tapak rumah gratis yang diberikan oleh Pemerintah Desa Palas untuk kemajuan Desa Palas ?

Kerangka Teori

a. Teori Strategi

Strategi dapat diartikan sebagai cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah kedepan untuk membangun visi dan misi organisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

Strategi adalah sebagian upaya yang disiplin untuk membuat keputusan dan tindakan-tindakan penting yang membentuk, mengarahkan suatu organisasi itu berjalan dengan sesuai yang diharapkan oleh semuanya (Dedemariana, 2012: 285).

Dari penjelasan strategi di atas menunjukan bahwa strategi mampu melaksanakan suatu kegiatan yang tepat sasaran sesuai dengan rencana yang dilakukan bersama-sama. Terkait dengan strategi terdapat tiga tahap untuk mencapai tujuan yaitu (Khoriddin,2002:29):

1. Formulasi strategi, termasuk mengembangkan visi dan misi serta menetapkan tujuan strategi yang dilaksanakan.
2. Implementasi strategi, mensyaratkan adanya program yang terlaksana dengan baik, dengan membuat program kebijakan, memotivasi dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah dilaksanakan dapat dijalankan.
3. Evaluasi strategi, tahap yang menentukan hasil akhir dalam merencanakan suatu strategi yang dihasilkan.

b. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah (powerless), dan mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (powerful) sehingga terjadi keseimbangan. Pengertian pemberdayaan tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya (Sunyoto Usman.2013:49).

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan ini berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya (powerless). Ketidakberdayaan yang dimaksud mencakup

pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, networking, semangat, kerja keras, ketekunan, dan lainnya. Ketidakberdayaan dari aspek tadi mengakibatkan ketergantungan dan kemiskinan. Pemberdayaan merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan. Istilah kekuasaan seringkali identik dengan Kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya. Dengan kata lain, kekuasaan menjadikan orang lain sebagai objek dari pengaruh atau keinginan dirinya.

Menurut konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembanguana adalah mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (dari, oleh, dan untuk masyarakat). Salah satu cara yang dipakai dalam teknik pemberdayaan ialah: Participatory Rural Appraisal (PRA) (Adimihardja dan Harry.2001:15). Lebih lanjut Harry menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapa aspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan, seperti :

1. Perumusan konsep.
2. Penyusunan model.
3. Proses perencanaan.
4. Pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaa.
5. Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaan.

Konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi dan lain-lain. memberdayakan masyarakat menurutadalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan

dan keterbelakangan (Adimihardja dan Harry.2001:25).

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut (Sutoroko Eko, 2005:18) ada lima macam yaitu:

1. Pendekatan dari bawah (bottom up approach): pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumusnya.
2. Partisipasi (participation): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
4. Keterpaduan: kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional, dan nasional.

Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan. Sedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah: pengembangan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah, dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, mobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan meningkatkan tingkat keberlanjutan (Nasikun, 2005:17).

Pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa tujuan yaitu (Khoriddin, 2002: 29) :

1. .Keadilan sosial
2. Kemakmuran merata
3. .Perlakuan yang sama di mata hukum
4. Kesejahteraan material, mental, dan spiritual
5. Kebahagiaan untuk sesama
6. Ketentraman dan keamanan.

Konsep pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang berkembang. Kedua, pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka memperkuat potensi ini, upaya yang amat pokok adalah peningkat taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi, seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Ketiga, pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat, dengan cara melindungi dengan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang (Ali, 2001: 170). Dalam memberdayakan suatu masyarakat, konsep pemberdayaan yang dijalankan tentunya berbeda-beda, melihat keadaan suatu masyarakat yang diberdayakan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara yaitu komunikasi secara langsung maupun tidak langsung dengan informasi penelitian dan melakukan tanya jawab yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Dokumentasi yaitu data berupa penelusuran dokumen yang digunakan untuk menggali informasi terkait dengan pelaksanaan program 1.000 tapak rumah gratis di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Pembahasan

Kronologi Terbentuknya Program 1.000 Tapak Rumah Gratis di Desa Palas

Program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis adalah suatu program yang digagas oleh Pemerintah Desa sebagai program pemberdayaan masyarakat yang berupa pemberian tapak rumah secara gratis kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang belum memiliki rumah sendiri, tapak rumah yang dimaksud disini yaitu tanah kosong dengan ukuran 15 m x 20 m = 300 m², kemudian masyarakat bebas membangun rumah diatas tanah kosong tersebut sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis ini pada awalnya digagas oleh Kepala Desa Palas pada bulan Februari 2016. Pada awalnya Desa Palas hanya memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.040 jiwa yang terdata dalam 377 Kartu Keluarga. Untuk itu Pemerintah Desa Palas dalam hal ini bapak H. Samsari.AS selaku Kepala Desa Palas berinisiatif untuk membuat program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis untuk memperbanyak masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Palas. Adapun tujuan dibuatnya program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis ini sesuai dengan

yang tertera pada Peraturan Desa Palas Nomor 3 Tahun 2016 tentang program 1.000 tapak rumah gratis bagi warga tidak mampu pada Bab II Pasal 3 menjelaskan :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan Desa melalui pengembangan tataruang Desa.
3. Sebagai wujud dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Desa Palas membuat program 1.000 tapak rumah ini tidak hanya untuk masyarakat Desa Palas saja, tetapi Pemerintah Desa Palas juga memberikan kesempatan kepada masyarakat dari luar Desa Palas bahkan luar Kecamatan hingga luar Kabupaten untuk mendapatkan tapak rumah tersebut. Berikut syarat-syarat untuk mendapatkan tapak rumah gratis:

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Fotocopy surat nikah.
4. Surat pindah (dibuat jika masyarakat itu berasal dari luar Desa Palas).

Setelah semua persyaratan sudah di penuhi oleh masyarakat yang mau mendapatkan tapak rumah gratis tersebut Pemerintah Desa Palas menegaskan kepada masyarakat yang mendapatkan tapak rumah gratis tersebut wajib menetap di Desa Palas tersebut.

Program 1.000 tapak rumah gratis ini di gagas oleh Pemerintah Desa Palas dalam hal ini Bapak H. Samsari.AS selaku Kepala Desa Palas yang telah disepakati bersama Badan permusyawaratan Desa Palas, yang mana sumber dana dari program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis ini adalah murni dari sumbangan Kepala Desa Palas kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Jutah Rupiah) yang digunakan untuk pembukaan lahan dan pembuatan jalan menuju lokasi program 1.000 tapak rumah gratis tersebut.

Strategi Pelaksanaan Program 1.000 Tapak Rumah Gratis di Desa Palas

Dalam pelaksanaan program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis ini yang dilaksanakan pemerintah Desa Palas dilakukan secara bertahap mengingat sumber dana yang hanya berasal dari sumbangan Kepala Desa Palas tersebut. Sesuai dengan yang di katakan bapak H. Samsari. AS pada tanggal 16 Februari 2017 selaku Kepala Desa Palas bahwa :

“Bahwa pelaksanaan program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis ini dilakukan secara bertahap mengingat sumber dana yang murni hanya berasal dari sumbangan pribadi, tidak ada bantuan dari pihak manapun baik itu pemerintah daerah, perusahaan maupun instansi-instansi yang ingin menanamkan modalnya”.

Dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak H. Samasari. AS pada tanggal 16 Februari 2017 selaku Kepala Desa Palas di atas dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Desa Palas memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan pelaksanaan program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis tersebut, karena Pemerintah Desa Palas tidak ada menerima sumbangan dana dari pihak manapun, sumber dana dari program ini murni dari pemerintah Desa Palas pada hal ini bapak H.Samsari.AS selaku Kepala Desa Palas yang menjabat saat sekarang ini.

Desa Palas merupakan salah satu desa dari Kecamatan Pangkalan Kuras yang memiliki jumlah Kartu Keluarga (KK) nomor empat terkecil di kecamatan tersebut. Desa Palas memiliki luas wilayah seluas 9.500 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 2.040 jiwa dan 377 Kartu Keluarga (KK).

Tapak rumah yang dimaksud disini yaitu tanah kosong dengan ukuran 15 m x 20 m = 300 m², kemudian masyarakat bebas

membangun rumah diatas tanah kosong tersebut sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Program 1.000 tapak rumah gratis ini diberikan untuk masyarakat miskin dan masyarakat yang belum memiliki rumah sendiri. Tapak rumah gratis ini tidak hanya untuk masyarakat Desa Palas saja tetapi Pemerintah Desa Palas membuka kesempatan untuk semua masyarakat dari luar Desa maupun luar Kecamatan hingga luar Kabupaten untuk mendapatkan tapak rumah gratis tersebut dengan syarat harus mengikuti prosedur yang telah dibuat.

1. Berikut syarat-syarat untuk mendapatkan tapak rumah gratis:
2. 1.Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
3. 2.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. 3.Fotocopy surat nikah.
5. 4.Surat pindah (dibuat jika masyarakat itu berasal dari luar Desa Palas).

Adapun tujuan dibuatnya program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis ini sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Desa Palas Nomor 3 Tahun 2016 tentang program 1.000 tapak rumah gratis bagi warga tidak mampu pada Bab II Pasal 3 menjelaskan :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan Desa melalui pengembangan tataruang Desa.
3. Sebagai wujud dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini diperkuat dari wawancara yang di sampaikan bapak H Samsari. AS selaku Kepala Desa Palas mengatakan tujuan dari program tersebut bahwa :

“memberikan tapak rumah layak huni kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang belum mempunyai tapak rumah sendiri, guna terciptanya

pembangunan infrastruktur wajah desa yang tertata dan kehidupan masyarakat Desa Palas yang lebih baik lagi dan untuk meningkatkan sektor perekonomian masyarakat hingga menuju kemandirian”.

Strategi Pelaksanaan Tahap Pertama

Strategi pelaksanaan program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis ini dilakukan pada bulan Februari sampai Agustus 2016, yang mana pada tahap ini pelaksanaan pembangunan sebanyak 200 tapak rumah dan semuanya kuota pada tahap pertama ini sudah penuh. Seperti yang dikatakan bapak H.Samsari. AS selaku Kepala Desa Palas pada tanggal 17 Februari 2017 bahwa :

“Pada tahap pertama ini kami membuka lahan yang kami beli dari tanah warga seluas 10 hektar, pada tahap ini biaya yang terpakai sekitar 250 juta untuk pembukaan lahan, sewa alat dan biaya upah ukur tanah tersebut, pada tahap pertama ini ada 200 kepala keluarga yang sudah membangun rumah dan sudah menempati di rumah baru tersebut, pada tahap ini kami cukup kewalahan dalam memproses warga yang mendaftar untuk mendapatkan tapak rumah ini, karena sangat banyak peminatnya hingga dari luar kabupaten”.

Di lihat dari hasil wawancara di atas, bahwa Pemerintah Desa sudah berhasil melaksanakan program pembangunan tersebut, hal ini ditunjukan dari adanya masyarakat yang terdata sebanyak 200 Kepala Keluarga yang bertambah bertempat tinggal di Desa Palas sekarang ini. Program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis ini sangat berdampak baik bagi kemajuan Desa Palas, terbukti dengan adanya program pembamngunan 1.000 tapak rumah gratis ini sangat banyak diminati oleh masyarakat dari luar Desa, luar Kecamatan hingga luar Kabupaten sehingga membuat Pemerintah

Desa sedikit kesusahan dalam mendata masyarakat yang sudah mendaftar untuk mendapatkan tapak rumah tersebut, disini Pemerintah Desa di tuntut lebih selektif untuk menyeleksi masyarakat yang mendaftar untuk mendapatkan tapak rumah tersebut, karena tujuan dibuatnya program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis ini yaitu untuk masyarakat miskin dan masyarakat yang belum memiliki rumah sendiri.

Pelaksanaan Tahap Kedua

Strategi pelaksanaan pembangunan program 1.000 tapak rumah gratis pada tahap kedua oleh Pemerintah Desa Palas dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember , pada tahap ini pembangunan yang terlaksana menjadi sebanyak 691 Kepala Keluarga, pada tahap kedua ini Pemerintah Desa lebih selektif dalam mendata masyarakat yang mendaftar untuk mendapatkan tapak rumah gratis yang diberikan oleh Pemerintah Desa Palas, meskipun yang mendaftar lebih banyak lagi dari tahap pertama tetapi Pemerintah Desa palas lebih memprioritaskan masyarakat yang mendaftar pada tahap pertama dulu, karena kuota masyarakat yang mendaftar pada tahap pertama masih banyak yang belum dapat tapak rumah gratis tersebut

Dampak Pembagian Program 1.000 Gratis Terhadap Kemajuan Desa PalaA

Dampak Ekonomi

Dengan adanya program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis ini perputaran ekonomi di Desa Palas semakin meningkat, hal ini di tandai dengan dibangunnya pasar tradisional baru oleh Pemerintah Desa yang jaraknyapun tidak jauh dari lokasi 1.000 tapak rumah gratis

tersebut. Dengan adanya program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis ini pasar Desa menjadi semakin ramai, hal ini ditandai oleh semakin banyaknya pedagang yang berjualan di pasar Desa Palas dan juga semakin banyak masyarakat yang berani membuka kios-kios hingga ruko di Desa Palas sebanyak 24 kios hal ini tentunya akan membuat perputaran ekonomi di Desa Palas menjadi semakin tinggi.

Dampak Politik

Dengan adanya program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis ini secara otomatis jumlah masyarakat di Desa Palas semakin meningkat dengan adanya masyarakat dari luar Desa Palas yang mendapatkan program 1.000 tapak rumah tersebut dan menetap di Desa Palas. Dengan adanya program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis ini Desa Palas menjadi lebih maju dari sebelumnya, Desa Palas menjadi lebih terkenal oleh Desa-desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras bahkan se-Kabupaten hingga tingkat Provinsi dan Nasional. Karena program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis ini sangat berdampak baik terhadap kesejahteraan kehidupan masyarakat. Dengan adanya program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis ini Pemerintahan Desa Palas banyak mendapat pujian-pujian positif dari Pemerintahan Desa lainnya, Pemerintahan Desa Palas mampu membuat contoh tauladan yang baik untuk di tiru oleh Pemerintahan Desa lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan tahun 2016 yaitu :

1. Program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis mulai digagas oleh Kepala Desa Palas sejak Februari 2016, yang telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa yang menggunakan sumber dana dari sumbangan Kepala Desa Palas kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah).
2. Program ini diberikan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang belum memiliki rumah sendiri, program 1.000 tapak rumah gratis ini tidak hanya untuk masyarakat Desa Palas saja, tetapi Pemerintah Desa Palas juga membuka kesempatan kepada masyarakat dari luar Desa, luar Kecamatan hingga luar Kabupaten.
3. Tapak rumah yang dimaksud disini yaitu tanah kosong dengan ukuran 15 m x 20 m= 300 m² atau Pemerintah Desa membutuhkan tanah untuk pembukaan lahan seluas 30 hektar.
4. Pada tahap pertama Pemerintah Desa Palas berhasil menarik sebanyak 200 Kepala Keluarga (KK) untuk bertempat tinggal di Desa Palas tersebut, dan pada tahap kedua pemerintah Desa Palas berhasil menarik masyarakat Desa Palas menjadi 690 Kepala Keluarga (KK)
5. Program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis ini sangat memberikan dampak baik terhadap kehidupan masyarakat Desa Palas, dengan adanya program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis ini masyarakat Desa Palas menjadi lebih ramai sehingga pertumbuhan ekonomi di Desa Palas juga menjadi lebih banyak. Ini ditandai dengan dibangunnya pasar tradisional oleh Pemerintahan Desa Palas yang lokasinya tidak jauh dari lokasi

program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis tersebut.

6. Program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis ini sangat baik untuk dijadikan contoh oleh para pemimpin-pemimpin lainnya, karena dengan adanya program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis ini pembangunan infrastruktur Desa menjadi lebih luas, bahkan sekarang ini dengan adanya program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis yang digagas oleh Kepala Desa Palas sekarang ini Desa Palas menjadi pusat perhatian oleh desa-desa lainnya, hal ini sangat berdampak baik bagi kemajuan Desa Palas untuk kedepannya.

Saran :

Program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis ini sangat banyak diminati oleh masyarakat, bukan hanya masyarakat lokal dari Desa Palas saja tetapi juga dari luar desa luar kecamatan hingga luar kabupaten, untuk itu pemerintah desa harus lebih selektif untuk mendata masyarakat yang benar-benar berhak dan layak untuk mendapatkan tapak rumah tersebut

Setelah sukses dengan adanya program pembangunan 1.000 tapak rumah gratis sebaiknya pemerintah desa terus memberikan arahan kepada masyarakat desa agar selalu menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Karena pemerintah hanya meberikan tapak rumah, kemudian masyarakat bebas membangun model rumah sesuai keinginan masyarakat itu sendiri.

Daftar Pustaka

Daftar Bacaan:

Adimihardja dan Harry. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendidikan Di Era Otonomi Daerah*. Bandung: CV Cakra

Azis, Moh. Ali. Dkk. (2001). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: PT. Pradyah Pramita.

Budiardjo, Miriam (Penerjemah). (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

Dedemariana. (2012). *Strategi Demokrasi dan Politik Desentralisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Khoriddin. (2002). *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty.

Kirmanto. (2006). *Perkembangan Pemerintahan di Daerah*. Yogyakarta: Liberty.

Mintzberg, Henry. (2007). *Pengantar Strategi Dan Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mulyanto. (2008). *Prinsip-prinsip Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Candi Gerbang Permai.

Nasikun, 1995, Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda, dalam Jefta Leibo, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta : Andi Offset.

Sumawinata, Sarbini. 2004. *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Surbakti, Rahman. (2006). *Perencanaan Pengembangan Wilayah Perdesaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sutoro Eko, 2002, *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa*. yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.

Sunyoto Usman, 2004, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Widjaja, Haw. (2003). *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Daerah Tertinggal.

Peraturan Desa Palas Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program 1.000 Tapak Rumah Gratis bagi Warga Tidak Mampu.